

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aju Putrijanti, Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, MMH 4 (Oktober 2015), hal. 426

A'An Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), hlm. 275.

B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). Teori Hukum.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 86

Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87-91.

Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 77

Damar Bayukesumo, *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010*, hlm. 25-26.

Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. *Teori & peraturan perundang-undangan* oleh Cetakan II : Desember 2019. Hal: 4

Fernado M Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara, hal.18

- H Zulkarnaen and Dwi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 288-289.
- Indroharto, *Usaha Memahami* (buku II), *Op. Cit.* hlm. 243; R. Subekti, *Hukum Acara*, *Op. Cit.* hlm. 128.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan*, *Op. Cit.* hlm. 249.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 112.
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 16.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 39
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hal. 48
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.20.
- Panggabean, H. P. (2014). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Paulus Effendie Lotulung dan Eddy Djunaedi, *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003) hlm. 12.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 35
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 332

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

Ridwan HR, "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", *Forum Keadilan* No. 22 Tahun II, 17 Februari 1994, hlm. 77.

Ridwan, H. (2014). *Hukum administrasi Negara* (edisi revisi). Raja Grafindo Persada, Jakarta

R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1975). hal. 42.

R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 105.

R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6-7

Sari, E., Sh, M. H., & ISKANDAR, H. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.

Sari, Leona Putri, and Arif Wibowo. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan tata usaha negara, Hukum, Indonesia, Putusan pengadilan." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2.1 (2023): 59-63.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 211.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1985)

Soepomo, *Hukum Acara Peradat Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 119.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983. hlm. 52.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*

Titik Triwulan T. dan Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group 2011, hlm. 611.

Triwulan, Titik, and M. H. Sh. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media, 2016.

Victor Yaved Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 75.

Wicipto Setiadi. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 93

Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 188.

B. JURNAL

Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.

Elwins, S. (2020). *PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN AGAM (Studi Perkara Nomor 749 PK/Pdt/2011)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).

Panjaitan, M. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 431-447.

Supandi, “Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)”, in “Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)”, 2011, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.

Triawan, H. (2022). Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 11(1), 22-39.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986

Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014.

Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985.